

OMBUDSMAN BABEL–KPK PERKUAT SINERGI, MALADMINISTRASI DISEBUT JADI PINTU MASUK KORUPSI

Rabu, 08 April 2026 - kepbabel

PANGKALPINANG - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan Satuan Tugas Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memperkuat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, Senin (6/4/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Untung Wicaksono selaku Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK. Rombongan disambut Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Kgs Chris Fither, bersama jajaran di kantor Ombudsman Babel, Pangkalpinang.

Dalam pertemuan itu, Kgs Chris Fither menegaskan bahwa sinergi antara Ombudsman dan KPK merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor pelayanan publik.

"Praktik maladministrasi kerap menjadi pintu awal terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik," ujar Fither.

Berdasarkan hasil pengawasan Ombudsman dalam tiga tahun terakhir, sektor pendidikan serta agraria/pertanahan menjadi yang paling rentan terhadap maladministrasi di Bangka Belitung. Pola yang kerap ditemukan antara lain penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, hingga tidak diberikannya pelayanan, yang berujung pada praktik pungutan liar dan potensi korupsi.

Sementara itu, Untung Wicaksono menyampaikan bahwa Ombudsman merupakan mitra strategis KPK dalam upaya pencegahan korupsi berbasis pengawasan pelayanan publik.

"Kami memandang Ombudsman sebagai mitra penting untuk menyamakan perspektif terkait keluhan pelayanan publik yang berpotensi mengarah pada perilaku koruptif. Dari laporan tersebut, dapat diidentifikasi titik rawan untuk dilakukan intervensi pencegahan," katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi ini juga penting untuk menjembatani keterbatasan kewenangan antar lembaga, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, termasuk melalui kepala daerah sebagai penanggung jawab layanan publik.

Fither juga menekankan bahwa lemahnya integritas penyelenggara pelayanan publik menjadi faktor utama terjadinya maladministrasi.

"Integritas adalah fondasi. Ketika integritas lemah, maladministrasi akan mudah terjadi dan membuka ruang bagi praktik korupsi," tegasnya.

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Ombudsman Babel mengusulkan sejumlah program strategis, seperti kajian

bersama terhadap sektor pelayanan publik yang rentan maladministrasi. Selain itu, capaian Indeks Integritas Nasional (IIN) di Bangka Belitung masih menunjukkan mayoritas berada pada kategori rentan.

Meski demikian, hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2025 menunjukkan tren positif, dengan sebagian besar pemerintah daerah berada di kategori hijau. Namun, masih terdapat satu wilayah yang berada di zona merah dan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam aspek pelayanan publik.

Ombudsman berharap sinergi ini dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi dari hulu melalui pembenahan sistem pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.